RENCANA KERJA

BPBD
KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I – 1**

1.1 Latar Belakang..... I – 1

1.2 Landasan Hukum..... I – 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I – 9

1.4 Sistematika Penulisan..... I – 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... **II – 11**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... II – 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kediri..... II – 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... II – 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD..... II – 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... **III – 31**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... III – 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... III – 32

3.3 Program dan Kegiatan..... III – 34

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... **IV – 41**

BAB V PENUTUP..... **V-44**

DAFTAR TABEL

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021..... II – 13

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD..... II – 21

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... II – 25

2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024..... II – 30

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... III - 37

4.1. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2024..... IV - 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, yang pelaksanaannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika pembangunan daerah-nasional.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan diantaranya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra SKPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD. Rencana Kerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dan untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 memuat Kebijakan Pembangunan, Sasaran, Uraian Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024, kerangka pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program yang pendanaannya langsung dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mekanisme dan proses penyusunan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD, selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 adalah menjabarkan seluruh rencana yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri selaras dengan rancangan awal RKPD, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selain itu juga untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri dalam mengoperasionalkan program/kegiatan yang efektif, efisien dan terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kediri

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kediri

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihatdari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yangmenjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkanrencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat *input, outcome* dan *output* BPBD Kabupaten Kediri tahun 2022. *Input* dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2022 dan realisasi Renstra BPBD Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

BPBD Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
1 05	**Bidang Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**										
1.05 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Prosentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Jumlah petugas yang mendapat honor	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Jumlah pejabat pengelola keuangan yang mendapat honor	100	40	100	100	1	100	240	2,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05 . 01 . 2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan Barang**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.03 . 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	40	100	100	1	100	240	2,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05 . 01 . 2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	40	100	100	1	100	240	2,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05 . 03	***PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA***	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	100	40	100	79,17	0,7917	100	219,17	2,1917	
1.05 . 03 . 2.01	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Prosentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.01 . 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	100	40	100	80,91	0,8091	100	220,91	2,2091	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05 . 03 . 2.02 . 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.02 . 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.02 . 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.02 . 05	Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	Jumlah penanganan pasca bencana	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05. 03. 2.02. 06	Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah rencana kontijensi yang disusun	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.02 . 10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	40	100	100	1	100	240	2,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05.03.2.02.0013	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.03 . 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	40	100	100	1	100	240	2,4	
1.05 . 03 . 2.03 . 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	40	100	100	1	100	240	2,4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja PD 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah (%)	Realisasi Renja Perangkat Daerah(%)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1.05 . 03 . 2.04	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Prosentase Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	0	40	100	100	1	0	140	1,4	
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	0	40	100	100	1	0	140	1,4	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin menurun, dengan menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Target)x100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD

Kabupaten Kediri

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Persentase capaian Penanggulangan Bencana dalam pemenuhan indikator indeks ketahanan daerah (IKD)	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat, provinsi maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka BPBD Kabupaten Kediri dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Kediri sebagai perencana, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Peningkatan kualitas hasil analisa, telaahan, kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kediri dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas ada fungsi, dapat diidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

1. belum optimalnya kuantitas sumber daya manusia, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja;
2. masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
3. sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal;
4. sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Arah penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2024 di dasarkan kepada hal-hal berikut :

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan ke dalam indikator sasaran agar dapat dicapai selama 5 tahun kedepan dari tahun 2021-2026.
2. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2024 berdasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 pada rencana tahun 2022.
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap rencana program kegiatan BPBD Kabupaten Kediri tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

BPBD Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***		**Prosentase capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	100%		***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***		**Prosentase capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	100%		
1.05.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah**	12 Bulan		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah**	12 Bulan		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.948.987.542	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.948.987.542	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	97.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	97.500.000	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	65.640.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	65.640.000	
1.05.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	20.109.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	20.109.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	8.854.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	8.854.600	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	4.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	4.920.000	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	145.091.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	145.091.000	
1.05.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.130.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1.130.000	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	3.020.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	3.020.000	
1.05.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kab. Kediri**	**Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit R4, 15 unit R2, 3 unit Truk	91.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit R4, 15 unit R2, 3 unit Truk	91.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	16.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	16.600.000	
1.05.03	***Program Penanggulangan Bencana***	**Kab. Kediri**	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**			***Program Penanggulangan Bencana***	**Kab. Kediri**	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**			
1.05.03.2.01	***Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	**Kab. Kediri**	***Prosentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***			***Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	**Kab. Kediri**	***Prosentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***			
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang	27.402.500	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun)	100 orang	27.402.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.03.2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	**Kab. Kediri**	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***			***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	**Kab. Kediri**	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***			
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 kawasan	93.390.100	Pengelolaan Resiko bencana kab/kota		Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 kawasan	93.390.100	
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	300 orang	178.316.600	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	300 orang	178.316.600	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	14 unit	40.769.600	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	14 unit	40.769.600	
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 Kawasan	564.735.600	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 Kawasan	564.735.600	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	49.760.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	49.760.000	
1.05.03.2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**Kab. Kediri**	***Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***			***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**Kab. Kediri**	***Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***			
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 orang	630.651.500	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 orang	630.651.500	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	597.020.500	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	597.020.500	
					6.584.899.142					**6.584.899.142**	

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel : 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Kediri

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah dan Kebijakan Nasional Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diamanatkan dalam peraturan tersebut bahwa perencanaan pembangunan disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dimana proses perencanaan belanja dan pembiayaan melalui konsultasi dengan para pakar. Pendekatan partisipatif dimana proses perencanaan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang. Pendekatan *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dimana proses perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan pendekatan *top-down* dimana proses perencanaan pembangunan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri 2005 – 2025 :

Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah dimuat dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRW, RPJMD, Renstra dan RKPD. RPJPD Kabupaten Kediri memuat :

Visi : *Terwujudnya peningkatan ketahanan daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana.*

Misi :

1. Melindungi masyarakat dari acaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
3. Menyusun regulasi kebencanaan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3.2.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri 2021-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program SKPD dan lintas SKPD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 memuat:

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani.*

Misi :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Nasionalis Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam, dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni, Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda; dan
9. Perwujudan Kemandirian Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan jangka menengah daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 diarahkan pada :

1) Pembangunan Ekonomi;
2) Pembangunan Konektivitas;
3) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4) Pembangunan Karakter;
5) Pembangunan Infrastruktur;
6) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
7) Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Kediri perlu merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD. Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Kediri adalah meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan adalah penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang diharapkan setiap tahun mengalami peningkatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran pencapaian keberhasilan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Kediri adalah Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam Upaya Mengurangi Resiko Bencana dengan indikator sasaran yaitu INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) .

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).

Program dan Kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.05.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
1.05.01.2.02	**Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**
1.05.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota**
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota
1.05.03.2.02	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1.05.03.2.02.0010	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsigaan terhadap bencana

1.05.03.2.03	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota

Tabel: 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Prosentase capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**Kab. Kediri**	**100%**	**4.402.852.742**	**APBD**		**100%**	**4.402.852.742**
1.05.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Prosentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah**	**Kab. Kediri**	**12 Bulan**	**4.112.127.542**	**APBD**		**12 Bulan**	**4.112.127.542**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri	12 Bulan	3.948.987.542	APBD		12 Bulan	3.948.987.542
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri	12 Bulan	97.500.000	APBD		12 Bulan	97.500.000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kediri	12 bulan	65.640.000	APBD		12 bulan	65.640.000
1.05.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kediri**		**178.975.200**	**APBD**			**178.975.200**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	20.109.600	APBD		12 bulan	20.109.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	8.854.600	APBD		12 bulan	8.854.600
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	4.920.000	APBD		12 bulan	4.920.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri	12 bulan	145.091.000	APBD		12 bulan	145.091.000
1.05.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kediri**		**4.150.000**	**APBD**			**4.150.000**
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri	12 bulan	1.130.000	APBD		12 bulan	1.130.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	3.020.000	APBD		12 bulan	3.020.000
1.05.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kediri**		**107.600.000**	**APBD**			**107.600.000**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kediri	7 unit R4, 15 unit R2, 3 unit Truk	91.000.000	APBD		7 unit R4, 15 unit R2, 3 unit Truk	91.000.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kediri	12 bulan	16.600.000	APBD		12 bulan	16.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.03	***Program Penanggulangan Bencana***	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**Kab. Kediri**		**2.182.046.400**	**APBD**			**2.182.046.400**
1.05.03.2.01	***Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***Prosentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	**Kab. Kediri**		**27.402.500**	**APBD**			**27.402.500**
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Kediri	100 orang	27.402.500	APBD		100 orang	27.402.500
1.05.03.2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	**Kab. Kediri**		**926.971.900**	**APBD**			**926.971.900**
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Kediri	1 kawasan	93.390.100	APBD		1 kawasan	93.390.100
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Kediri	300 orang	178.316.600	APBD		300 orang	178.316.600
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kediri	14 unit	40.769.600	APBD		14 unit	40.769.600
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kediri	8 Kawasan	564.735.600	APBD		8 Kawasan	564.735.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kediri	12 Laporan	49.760.000	APBD		12 Laporan	49.760.000
1.05.03.2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**Kab. Kediri**		**1.227.672.000**				**1.227.672.000**
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Kediri	300 orang	630.651.500	APBD		300 orang	630.651.500
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kediri	100 orang	597.020.500	APBD		100 orang	597.020.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp).
1.05.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Prosentase capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**	**4.402.852.742**
1.05.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Prosentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah**	**4.112.127.542**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.948.987.542
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.500.000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.640.000
1.05.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**178.975.200**
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.109.600
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.854.600
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.920.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.091.000
1.05.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.150.000**
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.130.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.020.000
1.05.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**107.600.000**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	91.000.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.600.000
1.05.03	***Program Penanggulangan Bencana***	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**2.182.046.600**
1.05.03.2.01	***Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***Prosentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	**27.402.500**
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperolehsosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnyaselama 1 (satu) tahun	27.402.500

1.05.03.2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	**926.971.900**
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	93.390.100
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	178.316.600
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	40.769.600
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	564.735.600
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	49.760.000
1.05.03.2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**1.227.672.000**
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	630.651.500
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	597.020.500

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KEDIRI

STEFANUS DJOKO SUKRISNO, S.Sos., MM
NIP. 19691226 198903 1 001